

**PENGARUH KARAKTERISTIK TUJUAN ANGGARAN, PENERAPAN SISTEM
INFORMASI AKUNTANSI DAN DESENTRALISASI TERHADAP KINERJA
APARAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALANG**

Ayu Febri Citra Pertiwi*

Maslichah**

M. Cholid Mawardi***

Email : ayufebriticra03@gmail.com

Universitas Islam Malang

ABSTRACT

This study is aimed to determine the effect of the characteristics of budget objective, application of accounting information system, and decentralization on the performance of local government officer Malang regency. Sources of data using primary data and using purposive sampling method shared to 43 government officers in district and sub-district as the respondents, but we only got back 34 respondents. The result of this study indicate that the variable characteristics of objective have a positive effect on the performance of local government officer Malang regency. While, the application of accounting information system and decentralization does not affect on the performance of local government officer Malang regency.

Keywords : *officer performance, characteristics of budget objective, application of accounting information system, decentralization*

PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, maka dalam pelaksanaan penyusunan anggaran, penerapan sistem dan pelimpahan wewenang pada instansi pemerintah daerah merupakan hal yang sangat menarik untuk ditelaah secara signifikan guna memberikan kejelasan kepada masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah bahwa aparat dapat dipercaya. Dalam suatu organisasi maupun instansi anggaran merupakan suatu hal yang terpenting untuk memperjelas suatu strategi dalam rencana dan tujuan, baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang.

Pemerintah Daerah setiap tahun menyusun anggaran untuk membentuk rencana kegiatan yang bertujuan mencapai kesejahteraan masyarakat. Anggaran ini disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penjelasan Rahayu (2007) dalam Istiyani (2009) menyebutkan bahwa sebelum APBD disahkan, terlihat berbeda dengan proses penganggaran sektor swasta dimana proses penganggaran organisasi sektor publik termasuk pemerintah daerah melewati tahap-tahap yang dinilai relatif rumit. Perbedaan pada sektor swasta merupakan anggaran yang bersifat bagian dari privasi bagi perusahaan dan tertutup bagi publik, sedangkan pada sektor publik anggaran sebuah hal yang harus dipublikasikan guna mendapatkan kritikan yang akan didiskusikan dan menghasilkan masukan bagi organisasi sektor publik.

Di banyak negara, termasuk Indonesia, reformasi manajemen publik harus secara efektif menjalankan tugas pejabat pemerintah daerah. Kinerja lembaga publik berpengaruh besar terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan daya saing bangsa di era global. Tata pemerintahan yang baik adalah konsep pemerintahan yang beroperasi secara bersih, tegak, dan demokratis. Definisi tentang kinerja merupakan suatu kegiatan yang berperan sebagai konsep guna meningkatkan pencapaian dalam pelaksanaan suatu program ataupun kebijaksanaan yang bertujuan untuk mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi suatu organisasi/instansi (Bastian.2001 :329).

Di sisi lain, perkembangan teknologi saat ini sangat pesat yang dapat memberikan kemudahan bagi aktivitas manusia. Penerapan teknologi informasi dalam suatu instansi saat ini merupakan hal terpenting. Namun, dalam penerapan teknologi informasi haruslah sesuai pada karakteristik instansi. Dibutuhkan orang-orang yang memiliki bakat serta kemampuan yang kuat dan berjiwa kompeten dalam bidang teknologi informasi guna dapat menggunakannya secara optimal. Kinerja aparat pemerintah sekarang sangat dipengaruhi oleh penggunaan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dengan efektif, hemat waktu, akurat dan efisien. Ketika pengguna suatu sistem informasi menemukan bahwa sistem tersebut mudah digunakan dan tidak perlu banyak usaha saat menggunakannya, mereka dapat menunjukkan kualitas dari sistem informasi tersebut. Oleh karena itu, lebih banyak waktu akan disisihkan untuk tugas-tugas lain yang berdampak pada peningkatan kinerja secara keseluruhan (Rukmiyati & Budiarta, 2016).

Desentralisasi memiliki beberapa tujuan untuk mencapai pelaksanaan dalam suatu instansi. Pada umumnya tujuan desentralisasi terdapat beberapa klasifikasi dalam dua variabel yang dianggap penting, meningkatkan efisiensi dan proses penyelenggaraan pemerintah yang efektif (metode model efisiensi struktural) dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemerintah (metode model demokrasi lokal). Selama periode waktu tertentu, fokus pada tujuan desentralisasi bervariasi dari satu negara ke negara lain (Prasojo, dkk 2006). Dalam pemerintah daerah di Indonesia terdapat istilah otonomi daerah yang merupakan hak, wewenang, kekuasaan, serta kewajiban daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya. Pada wewenang sistem pemerintahan Indonesia terdapat tiga asas yaitu sentralisasi, desentralisasi, dan dekonsentrasi.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti melakukan analisis dari pengaruh karakteristik tujuan anggaran, sistem informasi akuntansi, serta desentralisasi terhadap kinerja aparat pemerintah daerah terutama di Kabupaten Malang dimana kabupaten ini memiliki lingkup wilayah terluas kedua di Jawa Timur . Oleh sebab itu, peneliti mengambil judul **“Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dan Desentralisasi Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Malang”**

Rumusan Masalah

Menurut latar belakang yang telah dijelaskan, maka perumusan masalah adalah bagaimana pengaruh karakteristik tujuan anggaran, penerapan sistem informasi akuntansi, dan desentralisasi terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Malang?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh karakteristik tujuan anggaran, penerapan sistem informasi akuntansi, dan desentralisasi terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Malang.

Kontribusi Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan teoritis yang berguna sebagai referensi, pengembangan dan perbandingan dengan penelitian yang sejenis serta lebih khusus bermanfaat bagi ilmu pengetahuan di bidang akuntansi pemerintahan atau akuntansi sektor publik.

2. Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi instansi dan pegawai SKPD sebagai pijakan untuk mengembangkan serta mengevaluasi kinerja instansi dalam rangka melaksanakan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel terhadap masyarakat dengan menggunakan karakteristik tujuan anggaran yang ditetapkan dengan baik dan tepat.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Karakteristik Tujuan Anggaran

Anggaran (*budgeting*) merupakan alat perencanaan, alat pedoman, alat pengendalian bahkan alat pengawasan dalam bidang keuangan yang digunakan oleh organisasi hingga perusahaan yang berdasar pada laba maupun non-laba. Dalam pernyataan Mardiasmo (2002:61) anggaran merupakan ekspresi dari kinerja yang diharapkan yang dicapai dalam periode tertentu yang dicatat dalam indikator keuangan dan anggaran merupakan proses dalam penyusunan anggaran.

Menurut penelitian Kenis (1979) karakteristik tujuan anggaran menggunakan lima indikator antara lain partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran dan umpan balik anggaran.

Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang digunakan untuk mengolah data dan transaksi untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk merencanakan, mengendalikan, dan menjalankan bisnis Krismaji (2010:4).

Sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh pemerintahan daerah adalah sistem informasi pengelolaan SKPD. Diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah adalah prosedur yang dirangkai mulai dari proses mengumpulkan data, mencatat, mengikhtisar, hingga melaporkan keuangan guna mempertanggungjawabkan terlaksananya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Desentralisasi

Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang untuk membuat keputusan dalam organisasi dengan memberikan wewenang kepada manajer (termasuk membuat keputusan terikat bidang tanggung jawab di berbagai tingkat operasional) (Garrison, dkk, 2006:11).

Dalam mewujudkan desentralisasi negara Indonesia ialah dimana pemerintah melimpahkan kewenangan kepada bawahan untuk melaksanakan pembelanjaan dan pemungutan pajak. Dewan terbentuk dengan cara dipilih oleh rakyat, sedangkan Kepala Daerah dipilih oleh DPRD dengan sebuah pengalihan sebuah bantuan dari Pemerintah Pusat.

Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

Kinerja aparat pemerintah daerah adalah bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan perangkat Pemerintah daerah Indonesia (provinsi dan kabupaten/kota). SKPD merupakan pelaksana fungsi eksekutif dan harus dikoordinasikan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara optimal

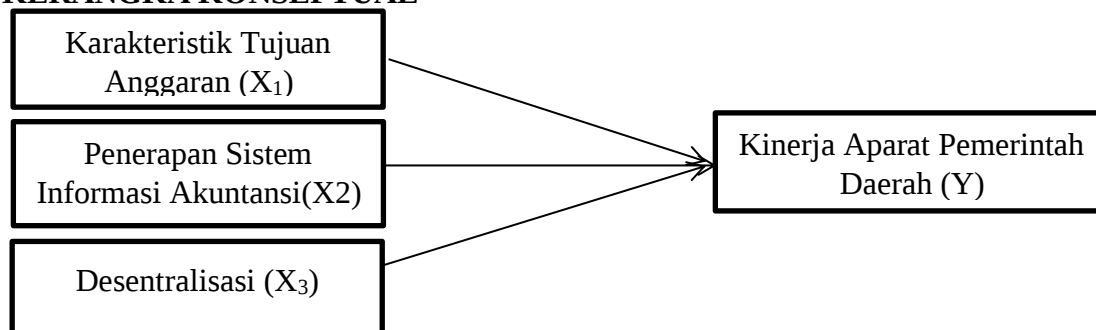
Dengan berdasar pada hukum perundang-undangan yang diberlakukan sejak tahun 2004 dalam pembentukan SKPD. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 120 ayat (1) menyebutkan bahwa perangkat daerah provinsi terdiri atas Sekretaris daerah, Sekretaris DPRD, Dinas daerah dan Lembaga teknis daerah. Dan pada ayat (2) menyebutkan bahwa perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas Sekretaris daerah, Sekretaris DPRD, Dinas daerah, Lembaga teknis daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Namun, gubernur beserta wakil, bupati dan wakil atau walikota dan wakil tidak termasuk ke dalam satuan tersebut, karena mereka memiliki status sebagai Kepala Daerah.

Penelitian Terdahulu

Tiana (2016) dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah(Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo)” menemukan bahwa Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Umpan Balik Anggaran, Evaluasi Anggaran, Kesulitan Tujuan Anggaran, dan Struktur Desentralisasi secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah.

Shopiana (2017) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah dengan Tingkat Desentralisasi Sebagai Pemoderasi”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel karakteristik tujuan anggaran dan desentralisasi berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Sementara itu, variabel sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, dan desentralisasi tidak dapat memoderasi dampak sasaran anggaran dan karakteristik sistem informasi akuntansi terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

KERANGKA KONSEPTUAL



Berdasarkan uraian dan gambaran penelitian diatas, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

H₁ : Terdapat pengaruh X₁ , X₂ , X₃ terhadap Y.

H_{1a} : Terdapat pengaruh X₁ terhadap Y

H_{1b} : Terdapat pengaruh X₂ terhadap Y.

H_{1c} : Terdapat pengaruh X₃ terhadap Y.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis , Lokasi dan Waktu Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui penyebaran kuisioner. Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang sebagai lokasi acuan pengajuan penelitian yang terletak di Jalan K. Haji Agus Salim No. 7, Kiduldalem, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65118.

Populasi penelitian ini adalah beberapa instansi yang tergabung dalam bagian dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemkab Malang tahun 2020. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Sampel penelitian ini adalah aparat pemerintah daerah pada yang menduduki jabatan Kepala Sub Bagian, Seksi Bagian, dan Sub Bagian dalam Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada instansi bagian dari SKPD Kabupaten Malang. Peneliti tertuju pada Badan Penelitian dan Pengembangan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam lingkup distrik pemerintah kabupaten Malang.

Metode Pengumpulan Data

Sumber data penelitian ini adalah data primer, dengan penyebaran kuisioner kepada pegawai yang menduduki jabatan Kepala Sub Bagian, Seksi Bagian, dan Sub Bagian dalam Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada lima instansi SKPD Kabupaten Malang. Skala likert yang digunakan dalam mengukur jawaban setiap item variabel.

Definisi Operasional Variabel

Karakteristik Tujuan Anggaran (X₁)

Definisi karakteristik tujuan anggaran sendiri menyatakan bahwa proses penyusunan anggaran harus dimulai dari ketetapan suatu tujuan, penentuan target dan kebijakan yang kuat. Maka pengukuran variabel ini dengan menggunakan indikator dengan instrumen yang dikembangkan oleh Kenis (1979) yang dimodifikasi oleh Mardiasmo (1997) digunakan oleh Munawar (2006) sebagai berikut :

1. Partisipasi atau keterlibatan dalam penentuan tujuan anggaran
2. Kejelasan tujuan anggaran
3. Evaluasi anggaran
4. Umpan balik anggaran
5. Kesulitan tujuan anggaran

Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (X₂)

Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang digunakan untuk mengolah data dan transaksi untuk menghasilkan informasi yang dapat digunakan untuk merencanakan, mengendalikan, dan menjalankan bisnis Krismaji (2010:4).

Indikator sistem informasi akuntansi dapat diukur dengan kuisioner yang diadopsi dari Jannah (2010) oleh Khaerunnisah (2019) :

1. Mampu menyelesaikan kinerja dengan cepat
2. Memberi kemudahan dalam kinerja

Desentralisasi (X₃)

Desentralisasi menurut Simon (1989) dalam Bangun (2009) ialah suatu organisasi administratif merupakan perluasan sentralisasi dimana kewenangan ditentukan oleh tingkat organisasi tertinggi, desentralisasi dapat diperluas jika wewenang eksekutif ditetapkan sebuah delegasi dari tingkat manajemen yang tinggi kepada tingkat yang rendah.

Indikator variabel desentralisasi Tarjono dan Nugraha (2015), yaitu :

1. Keuangan
2. Program dan kegiatan
3. Keterlibatan kegiatan
4. Kepegawaian

Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

Kinerja aparat pemerintah daerah merupakan variabel terikat dalam penelitian ini. Dalam kinerja aparat pemerintah daerah terdapat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan perangkat Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota).

Kinerja aparat pemerintah daerah dapat diukur dengan menggunakan indikator yang diadopsi dari Wulandari (2013) oleh Kristiastanti (2018):

1. Pencapaian target anggaran.
2. Tepat waktu dalam penyelesaian tugas.
3. Kuantitas serta kualitas pekerjaan.
4. Intensif bekerja.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan ialah analisis regresi berganda, dan seluruh data diolah dengan *software* SPSS 20.0.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Analisis Data

Populasi penelitian ini berjumlah 43 penyebaran kuisioner pada lima instansi SKPD namun terdapat satu instansi yang tidak mengembalikan 9 kuisioner. Sehingga, data yang diperoleh hanya 34.

Hasil Statistik Deskriptif

Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X ₁	34	2,55	3,31	2,9310	,26162
X ₂	34	3,50	4,67	4,1818	,29570
X ₃	34	3,50	5,00	4,5152	,49188
Y	34	3,75	5,00	4,5379	,40079
Valid N (listwise)	34				

Data kuisioner yang telah diperoleh selanjutnya direkap dan dilakukan analisis statistik deskriptif menggunakan program SPSS 20. Berikut interpretasinya :

1. Karakteristik tujuan anggaran (x_1) : nilai minimum 2,55 dan maksimum 3,31 , serta nilai *mean* 2,9310. standar deviasinya 0,26162.
2. Penerapan sistem informasi akuntansi (x_2) : nilai minimumnya 3,50 dan maksimumnya 3,50 , dengan *mean* 4,1818 dan standar deviasi 0,29570.
3. Desentralisasi (x_3) : nilai minimum 3,50 dan maksimum 5,00 dengan nilai *mean* 4,5152 dan standar deviasinya 0,49188.
4. Kinerja aparat pemerintah daerah (y) : nilai minimumnya 3,75 dan maksimum 5,00, dengan nilai *mean* 4,5379 dan nilai deviasi 0,40079.

Dinyatakan seluruh variabel menunjukkan nilai *mean* lebih besar dibanding standar deviasi, maka sebaran data kuisioner variabel karakteristik tujuan anggaran, penerapan sistem informasi akuntansi, desentralisasi dan kinerja aparat pemerintah daerah adalah baik.

Hasil Uji Kualitas Data

a. Hasil Uji Validitas

Uji validitas penelitian ini menggunakan KMO (*Kaiser-Meyer-Olkin*). Dengan menunjukkan hasil :

Tabel 2 Hasil Uji KMO

Variabel	<i>Kaiser-Meyer-Olkin</i> (KMO)	Keterangan
(X_1) terhadap (Y)	0.653	Valid
(X_2) terhadap (Y)	0.653	Valid
(X_3) terhadap (Y)	0.653	Valid

Nilai KMO semua item variabel yang saling berkaitan sesuai ketentuan 0.5 sampai dengan 1 , sehingga semua variabel dinyatakan valid sesuai ketentuan KMO.

b. Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 3 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i> (α)	Keterangan
Karakteristik Tujuan Anggaran (X_1)	0.654	Reliabel baik
Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (X_2)	0.403	Reliabel kurang baik
Desentralisasi (X_3)	0.700	Reliabel baik
Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Y)	0.722	Reliabel baik

Pada sistem informasi akuntansi (X_2) sedikit kurang reliabel karena terdapat perubahan data sedikit saat merevisi.

Hasil Uji Normalitas

Hasil uji normalitas *One Sample – Kolmogorov Smirnov* menunjukkan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal karena memiliki nilai Sig (2-tailed) > 0.05. Dengan hasil data *Kolmogorov – Smirnov Z* atau Asymp. Sig. (2-tailed) sebagai berikut :

Tabel 4 Hasil Uji Normalitas

	X ₁	X ₂	X ₃	Y
<i>Kolmogorov – Smirnov Z</i>	1.321	.840	1.332	.897
Asymp. Sig. (2-tailed)	.061	.481	.058	.396

Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Hasil Uji Multikolinearitas

Nilai *Tolerance* variabel independen (X₁ 0.899 , X₂ 0.896 dan X₃ 0.92) > 0.1 dan nilai VIF variabel independen (X₁ 1,112 , X₂ 1,117 dan X₃ 1,109) < 10. Dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi adanya multikolinearitas. Model regresi tidak terjadi adanya multikolinearitas. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara variabel X₁ , X₂ , dan X₃ tidak saling berhubungan.

b. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Nilai signifikan variabel karakteristik tujuan anggaran (X₁) 0.466 > 0,05 , penerapan sistem informasi akuntansi (X₂) 0.140 > 0,05 , dan desentralisasi (X₃) 0.297 > 0,05. Nilai Sig. seluruh variabel independen > 0.05 maka data ini dinyatakan terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Tabel hasil output model regresi ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,576	2,651		,595	,557
Karakteristik Tujuan Anggaran	,012	,017	,135	,738	,466
1 Penerapan Sistem Informasi Akuntansi	-,109	,072	-,278	-1,519	,140
Desentralisasi	,068	,064	,194	1,063	,297

a. Dependent Variable: Abs_RES

Pengujian Hipotesis

a. Uji Simultan (F-test)

Tabel 6 Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	24,735	3	8,245	4,158	,014 ^b
Residual	57,507	29	1,983		
Total	82,242	32			

a. Dependent Variable: Kinerja Aparat Pemda

b. Predictors: (Constant), Desentralisasi, Karakteristik Tujuan Anggaran, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi

Berdasarkan tabel hasil uji F diatas, nilai F adalah 4,158 dengan nilai Sig. 0.014. Nilai signifikansi F kurang dari nilai signifikansi yang telah ditentukan ($0.05 < 0.014$) H_0 ditolak dan H_1 diterima. Maka, disimpulkan bahwa variabel X_1 , X_2 , dan X_3 secara simultan berpengaruh terhadap Y.

b. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 7 Hasil Uji R²

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted Square	Std. Error of the Estimate
1	,548 ^a	,301	,228	1,408

a. Predictors: (Constant), Desentralisasi, Karakteristik Tujuan Anggaran, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi

b. Dependent Variable: Kinerja Aparat Pemda

Berdasarkan tabel uji R² diatas, nilai *adjusted* R² sebesar 0.301. Nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pada variabel X terhadap variabel Y. Dapat disimpulkan, nilai koefisien determinasi pada penelitian ini memiliki nilai positif dengan nilai desimal yang mendekati angka 0. Namun, pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) pada penelitian terbilang terbatas.

c. Uji Parsial (t-test)

Tabel 8 Hasil Uji-t

Model	T	Sig.	Interpretasi
(constant)	1.069	.294	
Karakteristik Tujuan Anggaran	2.630	.014	Berpengaruh
Penerapan Sistem Informasi Akuntansi	1.376	.179	Tidak Berpengaruh
Desentralisasi	-.236	.815	Tidak Berpengaruh

a. Dependent Variable : Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

Dalam pengolahan data diperoleh model regresi sebagai berikut :

$$\text{Kinerja Aparat Pemda (Y)} = 5,864 + 0,091X_1 + 0,204X_2 + -0,032X_3 + \varepsilon$$

a. Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran (X_1) terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Y)

Berdasarkan tabel hasil uji-t diatas, nilai t variabel karakteristik tujuan anggaran sebesar 2,630 dengan signifikansi (Sig.) 0.014. Nilai Sig. t variabel X_1 lebih kecil daripada nilai signifikansi yang ditentukan ($0.014 < 0.05$), maka H_{1a} diterima dan H_0 ditolak. Maka disimpulkan bahwa (X_1) terdapat pengaruh positif signifikan terhadap (Y).

Karakteristik tujuan anggaran memiliki lima indikator seperti yang disebutkan pada definisi operasional variabel, antara lain indikator yang pertama partisipasi atau keterlibatan dalam penentuan tujuan anggaran aparat pemerintah daerah Kabupaten Malang dalam penyusunan anggaran sudah meningkatkan kinerja secara efektif dalam organisasi. Hal ini sangat menjadikan alasan sebagai dorongan kepada setiap aparat untuk bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang sedang dilaksanakan sehingga target yang dicapai dapat dioptimalkan secara maksimal. Namun pada indikator kedua, kejelasan tujuan anggaran kurangnya transparansi tentang tujuan yang jelas dari pusat maka menyebabkan aparat pemerintah daerah Kabupaten Malang kurang memahami target-target dimasa depan. Kemudian indikator yang ketiga, umpan balik anggaran yang diterima oleh aparat pemkab Malang dapat dikatakan baik. Sementara itu, indikator yang keempat evaluasi anggaran yang dilakukan anggaran yang dilakukan pada Pemkab Malang sudah baik dalam mengungkap seberapa jauh tanggung jawab dalam mengemban tugasnya. Kemudian, yang terakhir kesulitan tujuan anggaran tidak menunjukkan keseriusan dikarenakan rendahnya apresiasi pegawai tentang keluhan-keluhan dalam kesulitan tujuan anggaran.

Hasil penelitian ini mendukung dalam penelitian Wardani dan Sudaryati (2015) yang menyimpulkan lima karakteristik dalam tujuan anggaran antara lain partisipasi anggaran dan kejelasan tujuan anggaran memiliki pengaruh terhadap kinerja aparat pemda. Namun, evaluasi anggaran, umpan balik anggaran, kesulitan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah kabupaten Bojonegoro.

b. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi (X_2) terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Y)

Berdasarkan tabel hasil uji-t , dapat diketahui nilai t variabel penerapan sistem informasi akuntansi sebesar 1,376 dengan signifikansi (Sig.) 0.179. Nilai Sig. t (X_2) lebih besar dari nilai signifikansi yang ditentukan ($0.179 > 0.05$), maka H_{1b} ditolak dan H_0 diterima. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh signifikan (X_2) terhadap variabel (Y).

Dalam hasil penelitian Shopiana (2017) sistem informasi akuntansi tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja aparat pemda. Menurut peneliti hal tersebut bisa saja terjadi meskipun sistem informasi akuntansi telah memberikan sebuah kemudahan operasional demi efisiensi waktu, namun juga sangat dibutuhkan *skill* dan keahlian aparat dalam pemahaman dan pemanfaatan dalam mengoperasikan sistem tersebut. begitupun sebaliknya *skill* aparat sudah baik namun pekerjaan yang begitu tidak menentu banyak sedikitnya atau kurangnya fasilitas yang memadai pada instansi tertentu. Penelitian ini dilakukan secara kuisioner dan tidak meninjau secara langsung pada sistem yang diterapkan, sehingga responden dari pegawai SKPD Kabupaten

Malang memilih dengan jawaban yang hampir sama per individu. Dari kebanyakan jawaban yang dipilih adalah keraguan atau skor 3 terutama dalam item penggunaan *hardware* yang menangkap, menyimpan, dan mengelola sumber data dengan cepat. Berarti pada penerapan menyimpan sumber data masih ada beberapa keraguan dan sedikit kekurangan.

c. Desentralisasi (X_3) terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Y)

Berdasarkan tabel hasil uji-t, nilai t variabel desentralisasi sebesar (-0.236) dengan signifikansi (Sig.) 0.815. Nilai signifikansi lebih besar dari nilai signifikansi telah ditentukan ($0.815 > 0.05$). Maka H_{1c} ditolak dan H_0 diterima. Maka disimpulkan (X_3) tidak terdapat pengaruh secara positif signifikan desentralisasi terhadap (Y).

Hasil penelitian Shopiana (2017) desentralisasi memiliki pengaruh terhadap kinerja aparat pemda. Namun desentralisasi tidak dapat memoderasi pengaruh karakteristik tujuan anggaran dan sistem informasi akuntansi. Menurut peneliti sendiri, hal tersebut dapat disebabkan adanya ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dan pelimpahan wewenang kepada bawahan di lingkungan kerja pemerintah kabupaten Malang. Dalam proses kegiatan penganggaran hanya dipusatkan dalam sebuah instansi. Sehingga, pekerjaan pada sebuah instansi tersebut terbelang sangat bertumpuk.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan karakteristik tujuan anggaran, penerapan sistem informasi akuntansi dan desentralisasi berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Malang.
2. Berdasarkan pengujian secara parsial karakteristik tujuan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Malang.
3. Berdasarkan pengujian parsial penerapan sistem informasi akuntansi dan desentralisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Malang.

Keterbatasan

1. Ruang lingkup pemerintah kabupaten Malang yang berubah aturan sehingga harus menanyakan apakah masih dapat menerima penelitian. Maka tidak dapat mendapatkan izin dengan banyak instansi.
2. Adanya pandemi Covid-19, responden dalam penelitian ini terdapat banyak batasan sehingga merasa kesulitan dalam mengumpulkan data.

Saran

1. Peneliti berikutnya memperbanyak jumlah sampel dan lingkup penelitian. Agar hasil penelitian menjadi lebih baik dan memberikan suatu gambaran secara rinci kinerja aparat pemerintah daerah.
2. Peraturan pemerintah daerah sebaiknya menanamkan prinsip transparansi dalam tanggung jawab penyusunan penganggaran agar dapat tersampaikan dengan baik informasi kepada masyarakat Kabupaten Malang akan anggaran yang sedang digunakan atau diolah dalam pembangunan daerah secara otonomi. Sehingga tidak adanya pemikiran yang tidak diinginkan di lingkup masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bangun, Andarias, 2009, *Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial SKPD Dengan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang)*, Tesis Universitas Sumatera Utara.
- Bastian, Indra. 2001, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: BPFE.
- Garrison, R. H., Noreen, E W., Brewer, P. C. (2006). *Akuntansi Manajerial*. Jakarta: Salemba empat. Edisi 1. Hal 11.
- Istiyani. (2009). *Pengaruh karakteristik tujuan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah*. Tesis Magister Akuntansi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Kenis, I., Effects of Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitudes and Performance. *The Accounting Review* (Oktober 1979). Hal 707-721.
- Khaerunnisah, A. (2019). *Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Antam Tbk* (Doctoral dissertation).
- Krismiaji. 2010. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi Ketiga. UPP-STIM YKPN. Yogyakarta. Hal 4-5.
- Kristiastanti, Eka. (2018). *Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Komitmen Orgnisasi, dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten)*. Skripsi. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.
- Mardiasmo, (2002), *Akuntansi Sektor Publik Pemerintahan*, Penerbit, Jakarta : Erlangga.
- Munawar, 2006. *Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Perilaku, Sikap dan Kinerja Aparat Pemerintah Daerah di Kabupaten Kupang. (Tesis)*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Prasojo, E., Maksum, I. R., & Kurniawan, T. (2006). *Desentralisasi dan pemerintah daerah: Antara model demokrasi lokal dan efisiensi struktural*. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
- Rukmiyati, N. M. S., & Budiarta, I. K. (2016). *Pengaruh Kualitas Sistem Informasi, Kualitas Informasi Dan Perceived Usefulness Pada Kepuasan Pengguna Akhir Software Akuntansi (Studi Empiris Pada Hotel Berbintang Di Provinsi Bali)*. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(1), 115-142.
- Shopiana, S., & Panjaitan, I. (2017). *Pengaruh Karateristik Tujuan Anggaran dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah dengan Tingkat Desentralisasi sebagai Pemoderasi*. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 3(1), 33-47.
- Tiana, A. (2016). *Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta)*.

Wardani, A. S., & Sudaryati, D. (2015). Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 16(1)

*) Ayu Febri Citra Pertiwi adalah Alumni Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.

**) Maslichah adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.

***) M. Cholid Mawardi adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang.